



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA**  
**DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai ASN dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

#### **Pasal 2**

Pedoman Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Batu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

- a. Uang Harian di dalam Kota Batu:
  1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b. Uang Harian di dalam Wilayah Malang Raya, (Kabupaten/Kota Malang):
  - 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang Harian di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur:
  - 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3. Bantuan Transport sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4. Penginapan Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5. Penginapan Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Uang Harian di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur:
  - 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2. Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3. Bantuan Transport sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
  - 4. Penginapan Ketua Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 5. Penginapan Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan lainnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 3**

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2.15.02.

### **Pasal 4**

Pedoman Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017.

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 19 Juni 2017

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 19 Juni 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**WIDODO**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 59/A